

## MENAKAR REALITAS POLITIK PENCITRAAN PADA PILGUB NTB 2018 (Perspektif Etika Politik Islam)

Ahmad Nurjihadi

Universitas Islam Negeri Mataram

[ahmadnurjihadi@uinmataram.ac.id](mailto:ahmadnurjihadi@uinmataram.ac.id)

*Fokus studi ini berusaha menjawab bagaimana politik pencitraan yang dimainkan oleh kontestan calon gubernur dan wakil gubernur pada PILGUB NTB 2018 dan bagaimana Analisis Etika Politik Islam terhadap fakta politik pencitraan. Karakter penelitian ini adalah penelitian fenomenologis yang akan mengurai etika dan moralitas politik yang melatari adanya politik pencitraan para kandidat. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis fenomena yang berusaha mengurai fakta politik pencitraan dan menakarnya dengan analisis etika politik Islam. Hasil penelitian beberapa kecenderungan yaitu; pertama, A dan B mencalonkan diri menjadi Gubernur NTB 2018 padahal masa baktinya baru berjalan kurang dari 2 Tahun. Kedua, Fenomena perempuan dan kecenderungan politik dinasti. Ketiga, kecenderungan politisi nasional turun gunung. Keempat, Personafikasi Personal Kandidat seperti penonjolan citra yang berbasis dan berintegritas agamais (Muslim). Kelima, Pseudo-Populis yaitu adanya fenomena mendadak populis yang ditampilkan oleh beberapa calon. Keenam adalah Penguatan Identitas Komunal dan Kewilayahan seperti afiliasi pada organisasi keagamaan, putra daerah yang berbasis kewilayahan dan asal suku.*

*The focus of this study seeks to answer how imaging politics are played by contestants of governor and deputy governor candidates in the NTB 2018 PILGUB and how to analyze Islamic political ethics against the facts of imaging politics. The character of this research is phenomenological research which will unravel political ethics and morality which underlie the existence of political imaging of candidates. The technical analysis used is an analysis of phenomena that try to unravel the facts of imaging politics and measure them by analyzing Islamic political ethics. The results of the study are several trends, namely; first, A and B nominate themselves as the Governor of NTB 2018 even though their tenure has been running for less than 2 years. Second, the phenomenon of women and dynastic political tendencies. Third, the tendency of national*

*politicians to go down the mountain. Fourth, Personafication of Personal Candidates is like a prominent image based on religious (Muslim) integrity. Fifth, Psedo-Populis is a sudden populist phenomenon that is displayed by several candidates. Sixth is Strengthening Communal and Regional Identity such as affiliation with religious organizations, regional sons based on territory and ethnic origin.*

Keyword: *Imaging Politics, Political Communication, Islamic Political Ethic*

## A. PENDAHULUAN

Imagologi (imago berarti imaji atau citra dan logos berarti ilmu atau kebenaran) merupakan definisi sentral yang digunakan untuk menjelaskan ilmu tentang citra di dalam masyarakat dan signifikansi informasi serta peran sentral teknologi informasi dalam membentuk citra tersebut. Penggunaan citra-citra tertentu untuk mengkreasi imaji tentang realitas yang pada titik tertentu dianggap merupakan realitas itu sendiri merupakan sasaran dari imagologi.<sup>1</sup>

Imagologi Politik atau politik pencitraan merupakan satu strategi politik yang kian populer di kalangan para politisi atau peminat politik untuk memperkuat citra diri mereka di mata publik. Pencitraan menjadi perspektif yang khas bagi seseorang untuk menilai individuasi dan kelompok dalam politik praktis.

Politik secara definitif sekurang-kurangnya terbangun dalam lima pandangan. *Pertama*, politik merupakan ikhtiar atau usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Imagologi (imago berarti imaji atau citra dan logos berarti ilmu atau kebenaran) merupakan definisi sentral yang digunakan untuk menjelaskan ilmu tentang citra di dalam masyarakat dan signifikansi informasi serta peran sentral teknologi informasi dalam membentuk citra tersebut. Penggunaan citra-citra tertentu untuk mengkreasi imaji tentang realitas yang pada titik tertentu dianggap merupakan realitas itu sendiri merupakan sasaran dari imagologi. Lihat, Yasraf Amir Piliang, *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), hlm.150. Lihat juga, <https://dhutag.wordpress.com/2009/05/10/politik-imagologi/>, di akses tanggal 15 Januari 2018

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Sedangkan *Siyasah* (Politik Islam) merupakan postulat hal-ihwal, seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Politik Islam (*Siyasah*) secara ontologis sangat mengedepankan etika, karena etika merupakan entitas utama dalam Islam politik yang secara logis seide dengan capaian filsafat moral manusia sebagai pengetahuan normatif yang membutuhkan medium pembedaan (*embodying*) dalam bentuk laku manusia dalam menjalani kehidupan sosial dan keagamaan secara komprehensif.<sup>2</sup>

Selanjutnya etika politik memiliki tujuan mentransformasi yang mana tingkah laku atau laku politik yang baik dan buruk. Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum (kemaslahatan umat) yang jelas-jelas jauh dari pretensi kepentingan individu dan golongan tertentu.

Pada konteks berpolitik di Indonesia dapat diperhatikan bahwa semenjak era reformasi yang membuka kran demokrasi dan kebebasan politik seluas-luasnya. Tampak jelas dan miris dimana para politisi Negara ini mempertontonkan kendornya (dekadensi?) etika politik dalam setiap jejak perjalanan suksesi demokrasi prosedural maupun demokrasi substantif. Sikap pragmatisme dalam laku politik yang individuatif dan atau mementingkan kelompoknya saja tanpa menghiraukan kepentingan bangsa yang menjadi prioritas utama. Kondisi ini dalam praktik keseharian menggambarkan politik berwajah kuasa elitis daripada kekuasaan dengan wajah populis dan

---

<sup>2</sup> Lihat, Muhammad Zakaria al-Naddaf, *Akhlaqus Siyasi Li al-Daulah al-Islamiyyah Fi al Qur'an wa al-Sunnah*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 2006), Cct. Kc-1, Hlm.19.

untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Politik menjadi identik dengan strategi bagaimana kekuasaan diraih dan dengan cara apapun walaupun bertentangan dengan kesadaran dan pandangan umum.

Tanpa kita sadari, nilai etis politik cenderung mengarah pada kompetisi dan kontestasi yang mengabaikan moral. Ini terbukti dengan mengguritanya *political shoping* (pasar politik) karena semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang dan semua jabatan politik memiliki banderol (daftar harga) yang harus dibayar. Bangga menjadi Negara demokrasi yang damai terbesar setelah Amerika Serikat dan India disamping Negara yan berpenduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi fenomena politik yang menyeruak belakangan ini malah mengarah serta menohok pada arus balik yang condong mengotori demokrasi, nilai-nilai *psedu-democracy* (kepura-puraan demokrasi) yang dijadikan sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### A.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi dan ruang lingkup masalah di atas, fokus studi dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana fenomena politik pencitraan yang dimainkan oleh Politisi NTB pada kontestasi pemilihan gubernur NTB 2018? (2) Bagaimanakah analisis *siyasah syar'iyah* terhadap politik pencitraan Politisi NTB pada PILGUB 2018?

#### A.2 Metode Penelitian

Studi ini adalah penelitian fenomenologis yang akan membongkar paradigma, etika dan moralitas politik yang mendasari realitas politik pencitraan oleh politisi NTB. Penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara guna mendapatkan data-data utama dan pendukung tentang fakta-fakta nyata tentang politik pencitraan pada pemilihan Gubernur NTB, lalu dilanjutkan dengan merekonstruksi dengan menganalisa fenomena tersebut dengan konsepsi *siyasah syar'iyah* dan etika politik Islam.

Data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini ada dua kategori data yaitu data berbentuk fenomena politik pencitraan dan teorisasi etika politik dalam siyasah Islam. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis fenomena sistemik yang berusaha mengurai realitas politik pencitraan para politisi NTB dan menakarnya dengan analisis etika politik Islam.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Konfigurasi Kandidat dan Politik Pencitraan pada PILGUB NTB 2018**

Berikut profil dan aktivitas politik singkat seluruh bakal calon gubernur NTB menjelang pemilihan gubernur 2018 dan jabatan yang sedang diemban pada priode dimulainya kontestasi pilgub NTB 2018 beserta visi misi dan konstruksi citra politik yang dibangun oleh masing-masing calon:

#### **1. Pasangan H. Moh. Suhaili Fadhil Thohir, SH dan Muhammad Amin**

Suhaili lahir di Lombok Tengah pada 31 Desember 1966 dengan riwayat pendidikan SDN 1 Bodak tahun 1980, SMPN 1 Praya tahun 1983, SMAN 1 Mataram tahun 1986 dan Universitas Islam al-Azhar Mataram pada tahun 2000. Aktivitas sosial keagamaan dan kemasyarakatan menjadi konsentrasi Suhaili yang notabene anak kandung dari pendiri YATOFA (Yayasan Thohir Fadhik) Bodak Praya.

Pada ranah politik, aktivitas politik Suhaili mulai dengan menjabat sebagai fungsionaris partai Golkar selaku Wakil Ketua Harian DPD I Golkar provinsi NTB. Dilanjutkan dengan terpilihnya sebagai Ketua DPR Provinsi NTB periode 2004-2009 dan priode 2009-2014. Di tengah perjalanan sebagai Ketua DPRD NTB, Suhaili mencalonkan diri dan memenangkan kontestasi menjadi Bupati Lombok Tengah priode 2010-2015 di tahun yang sama Suhaili pun menjadi Ketua DPD II Golkar Lombok Tengah dan setahun selanjutnya menjadi Ketua DPD I Golkar NTB. Sampai penelitian ini dilakukan Suhaili masih menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah priode kedua yaitu priode 2015-2020. Pada akhirnya paket pasangan Suhaili-Amin mendaftarkan ke

KPU beserta partai pengusung sampai disahkan oleh KPU NTB untuk ikut ambil bagian dalam kontestasi PILGUB NTB 2018 dengan nomor urut satu (1).

Adapun visi misi dan citra politik yang dibangun oleh calon nomor urut 1 (pasangan Suhaili-Amin) ini terurai dari visi dan misinya yaitu NTB sejahtera yang diderivasi dengan misi dan tolak ukur yang jelas antara lain; (1) peningkatan mutu pendidikan sekolah, (2) peningkatan kapasitas SDM melalui vokasi (diklat) dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, (3) bantuan pendidikan bagi murid kurang mampu dan berkebutuhan khusus, (4) pemantapan partisipasi sekolah dan penanggulangan *drop out* sekolah, (5) pencegahan dan perlindungan anak sekolah terhadap narkoba, (6) pengembangan dan pembinaan generasi muda dan prestasi olahraga, dan (7) kemitraan pemerintah-swasta untuk meningkatkan daya saing SDM.

Idealitas visi misi di atas sewajarnya menjadi garis perjuangan suksesti pasangan calon Suhaili-Amin dalam kampanye dan pembangunan citra politik dan politik pencitraan yang dilakoni oleh calon dan tim suksesnya. Idealitas ini senada dengan tanggapan dan pendapat Ahmad (Memet) salah satu tim sukses pasangan Suhaili-Amin juga pengurus partai NASDEM pengusung pasangan ini yang menyatakan sebagai berikut:

“Normatifnya, pasangan Suhaili-Amin dengan visi misi yang diusung kalau menggunakan analisis SWOT maka sangat laik dan cocok sekali menjadi Gubernur-Wakil Gubernur NTB karena visinya sangat terukur dan mudah dipahami, belum lagi modalitas pribadi mereka yang memiliki basis pemilih yang jelas. Maka, harga mati bagi kami untuk memasarkan dengan berbagai cara tentang keunggulan pasangan Suhaili-Amin dalam kontestasi PILGUB NTB 2018. Di samping itu, tentu keharusan bagi kami untuk mencitrakan pasangan Suhaili-Amin adalah yang terbaik dibanding pasangan calon lain. Pak Suhaili adalah pria keturunan Tuanguru Bodak (YATOFA), maka trah tuanguru-an melekat kepadanya. Dengan itu kami mencitrakan dia sebagai orang yang agamais”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ahmad (Memet), salah satu tim sukses pasangan Suhaili-Amin di Praya pada tanggal 23 juni 2018.

Penjelasan dari Ahmad (Memet) menggambarkan bahwa pasangan Suhaili-Amin merupakan pasangan yang memiliki kredibilitas yang baik dengan visi misi yang terukur dan *applicable* dan cepat dicerna oleh pemilih. Peneliti menggarisbawahi diksi pencitraan dengan berbagai cara yang nantinya dianalisis pada fakta politik pencitraan di sub-bab di bawah.

Senada dengan hasil wawancara di atas adalah pendapat Zainuri Ali yang memberikan argumentasi lain tentang kelebihan pasangan Suhaili-Amin dan cara mencitra politik kandidat kepada masyarakat NTB adalah;

“Realitasnya bahwa pasangan Suhaili-Amin memiliki modalitas sosial dan politik yang mumpuni karena Cagub Suhaili berpengalaman menjadi Bupati Lombok Tengah dua priode berjalan dan Cawagub Muhammad Amin adalah Wakil Gubernur NTB petahana yang memiliki basis massa yang jelas terutama untuk wilayah pulau Sumbawa. Jadi, mencitrakan mereka dengan dua manusia yang sempurna modal politik dan kepribadian akan kami lakukan dengan bentuk yang beragam dan meyakinkan pada segmen-segmen pemilih. Belum lagi pasangan Suhaili-Amin sama-sama menempati posisi ketua umum Dewan Pengurus Wilayah partai Golkar dan NasDem, maka agak mudah bagi kami untuk mem”*branding*” keduanya sebagai politisi yang teruji”<sup>4</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas, peneliti menangkap beberapa hal yang menjadi catatan dalam citra politik dan politik pencitraan yang dibangun oleh pasangan calon nomor urut 1 (Suhaili-Amin) yaitu upaya pencitraan yang dilakukan dengan berbagai cara dengan memaksimalkan peran tim sukses dalam menjalankan aktivitas politik pencitraan mulai dari men-personifikasi Cagub Moh.suhaili yang agamais dengan surban dan peci putih dengan pesan bahwa dia merupakan keturunan dari ulama dan Tuanguru Fadhil Thaohir pemilik pondok pesantren besar di Lombok yaitu YATOFA. Pencitraan lain adalah keberhasilan Cagub Moh. Suhaili dalam membangun Lombok Tengah selama menjadi Bupati Lombok Tengah dengan klaim pembangunan infrastruktur jalan hanya pada priode dia menjadi Bupati.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Zainuri Ali, Tim Sukses pasangan Suhaili-Amin di Mataram tanggal 24 Juli 2018.

## 2. H. Ahyar Abduh dan Mori Hanafi

Ahyar Abduh lahir di Mataram pada tanggal 20 oktober 1960. Karir politik Ahyar dimulai dari menjabat sebagai kepala Sekretariat DPD Golkar Provinsi NTB pada tahun 1993, kemudian menjadi anggota DPRD Kotamadya Dati II mataram periode 1994-1997 dan kedua kali pada periode 1997-1999. Selanjutnya menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram periode 1999-2004. Pada 2004-2005 Ahyar menjabat sebagai Ketua DPRD kota Mataram. Pada karir selanjutnya Ahyar diangkat menjadi Wakil Walikota Mataram periode 2005-2010. Pada jabatan selanjutnya Ahyar melanggeng menjadi Walikota Mataram priode 2010-2015 dan terpilih kembali menjadi walikota Mataram periode selanjutnya yaitu 2016-2021.<sup>5</sup>

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Ahyar Abduh-Mori Hanafi secara resmi telah mendapatkan dukungan dari partai Gerindra. Pasangan yang sudah lebih dulu juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menerima dukungan dan rekomendasi dukungan definitif dari partai berlambang kepala burung Garuda emas itu.

Visi misi dan citra politik yang dibangun oleh calon nomor urut 2 (pasangan TGH. Ahyar Abduh-Mori Hanafi) yaitu dengan slogan "NTB untuk Semua" yang disandarkan kepada semangat dan komitmen kepala daerah bagi warganya. Misi dan program unggulan calon nomor urut 2 ini antara lain; (1) NTB Toleran: Mewujudkan masyarakat NTB yang disegani, ramah dan bersahabat, (2) NTB Aman: Pencegahan tindak kriminal (Cegat Kriminal), (3) NTB Eksis: Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat, (4) NTB Makmur: Perwujudan kemakmuran nyata di Desa dan Kota, (5) NTB Woouw: Pengembangan pariwisata massal berkelanjutan yang berkeseimbangan dengan pariwisata halal, tematik dan minat khusus pada potensi-potensi wisata lain, dan (6) NTB Berderma: Menjadikan NTB sebagai gudang pangan dan gudang daging nasional.

Turunan ideal dari visi misi calon nomor urut 2 pasangan Ahyar-Mori terefleksi menjadi acuan bagi para tim sukses dalam rangka mencitrakan

---

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2018.

kandidat nomor urut 2 untuk dikampanyekan kepada pemilih NTB. Tentu saja pasangan calon ini ideal bagi para tim sukses mereka. Idealitas ini diuraikan dengan gamblang oleh Muti'ah Murni selaku juru bicara pasangan Ahyar-Mori yang menyatakan bahwa:

“Pasangan Tuanguru Ahyar dan Pak Mori merupakan pasangan yang ideal bagi NTB karena merepresentasikan *ulama-umara* yaitu H. Ahyar Abduh yang disandingkan dengan Mori Hanafi yang politisi dari partai Gerindra dan juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Basis massa pasangan Ahyar-Mori yang merata di semua kabupaten kota di NTB dan menjadi pasangan ideal karena perwakilan dari dua pulau (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa). Jadi kami harus men”*branding*” calon nomor urut 2 sebagai calon yang sangat ideal bagi NTB karena ketokohan Tuanguru-nya dan kematangan politik calon wakilnya. Kami akan melakukan segala upaya untuk merebut hati pemilih terutama dengan mengkampanyekan pasangan nomor urut dua yang merupakan tokoh terbaik NTB saat ini yang layak menggantikan TGB karena satu-satunya Calon yang memiliki predikat Tuanguru.”<sup>6</sup>

Narasi dari Muti'ah Murni menjelaskan bahwa pasangan Ahyar-Mori merupakan pasangan yang memiliki kredibilitas dan elektabilitas yang baik dengan visi misi yang nyata dan mencitrakan pasangan calon Gubernur yang memiliki ketokohan Tuanguru di antara calon yang lain.

Wawancara lain adalah argumentasi tentang kelebihan pasangan Ahyar-Mori dan strategi membangun citra politik kepada pemilih NTB adalah Bapak Munawar Harun yang menyatakan;

“Pasangan Ahyar-Mori adalah pasangan serasi, karena pasangan ini merupakan perwakilan ideal bagi topografi penduduk NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Karena sebaran penduduk terbesar di NTB ada di pulau Lombok, maka Tuanguru Ahyar sangat cocok jadi Gubernur dan Pak Mori jadi wakilnya. Belum lagi dukungan partai yang paling besar ke calon kami yaitu gabungan partai Gerindra, PDIP, PPP, PAN, Hanura dan Partai Bulan Bintang yang sangat kompak mendukung pasangan ini. Kami akan memperkuat mesin partai untuk mendulang suara terbanyak nantinya. Intinya, kami dari tim sukses sangat PD “percaya diri” dengan infrastruktur dan suprastruktur politik untuk memenangkan pasangan Ahyar-Mori.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Muti'ah Murni, Jurubicara pasangan Ahyar-Mori di Mataram pada tanggal 26 juni 2018.

Untuk itu, kami melakukan kampanye dengan segenap kemampuan termasuk dengan cara menpersonifikasi ke-tuanguru-an Pak Ahyar, disamping penguatan pesan di panflet dan baliho-baliho yang menggambarkan kedekatan calon juga dengan masyarakat melalui foto-foto. ”<sup>7</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh Hidayatulloh salah satu tim sukses pasangan Ahyar-Mori yang mendeskripsikan tentang citra politik dan politik pencitraan pasangan calonnya dengan menyatakan bahwa;

"Cagub Tuanguru Ahyar memiliki latar belakang yang kuat di kota Mataram, karena hampir karir politik terbanyaknya menjadi Wakil Walikota dan Walikota di Mataram. Sisi lain, dia adalah putra kelahiran Lombok Timur dan istrinya asli Lombok Tengah sehingga peluang untuk meraup suara dari Pulau Lombok akan *tercover*. Begitu juga dengan Pak Mori yang notabene putra asli Bima dan satu-satunya dari perwakilan Bima-Dompu, maka potensi untuk mendulang suara di pulau Sumbawa menjadi lebih besar. ”<sup>8</sup>

Peneliti mencermati beberapa hal yang menjadi catatan bahwa politik pencitraan yang dibangun oleh pasangan calon nomor urut 2 (Ahyar-Mori) beserta tim suksesnya yaitu berupaya dengan berbagai cara menjalankan aktivitas politik pencitraan mulai dari men-personifikasi Cagub Ahyar Abduh sebagai orang yang agamais dan satu-satunya calon Gubernur yang bergelar agama Tuanguru. Pencitraan dalam bentuk lain adalah berkaitan dengan melekatnya pribadi Cagub dan Cawagub nomor urut 2 sebagai representasi dan keterwakilan semua wilayah kabupaten kota di NTB. Di samping itu, kepercayaan diri pasangan calon nomor urut 2 semakin membunyah dikarenakan oleh gabungan partai pengusung yang sangat besar seperti yang telah dijelaskan di atas.

### 3. Zulkeiflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah

Zulkeiflimansyah lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 18 Mei 1972. Terjun ke ranah politik, Zulkeiflimansyah mendapat banyak

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Munawar Harun, Tim Sukses pasangan Ahyar-Mori di Mataram tanggal 20 Juli 2018.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hidayatulloh, tim sukses pasangan Ahyar-Mori pada tanggal 24 Juli 2018

dukungan. Ia dipercaya untuk duduk menjadi wakil rakyat di DPR RI periode 2004-2009. Selanjutnya digandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zulkeiflimansyah diangkat lagi mewakili daerah pemilihan Banten 2. Selain menjadi sekretaris Fraksi PKS MPR, Zulkieflimansyah juga tergabung di komisi VII. Kemudian per November 2011 dia diamanatkan juga menjadi Wakil Ketua di komisi XI sampai 2014. Dan pada periode 2014-2019, Zulkeiflimansyah mendapatkan kepercayaan kembali untuk menjadi wakil ketua fraksi PKS Bidang Litbang.<sup>9</sup>

Sitti Rohmi Djalilah lahir di Pancor pada tanggal 29 November 1968. Dia menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di SDN 3 Mataram tahun 1951, kemudian SMPN 2 Mataram tahun 1984 dan SMAN 1 Mataram tahun 1987. Seusai SMA, rohmi melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Surabaya (ITS) lulus tahun 1992, kemudian S2 di Universitas Negeri Surakarta dan S3 di Universitas Negeri Jakarta.

Adapun pengalaman dan karir Rohmi dimulai dengan menjadi General Foreman di PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 2000-2009, kemudian hijrah ke dunia politik dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2009-2013 dan sejak tahun 2012 hingga sekarang aktif di dunia akademik dengan jabatan Rektor di Universitas Hamzanwadi Selong.<sup>10</sup> Kakak kandung Gubernur sebelumnya M. Zainul Majdi ini secara resmi diusung oleh PB NW Pancor untuk maju menjadi bakal calon Gubernur NTB periode 2018-2023 di samping dukungan partai Demokrat NTB. Hingga akhirnya secara definitif pencalonan pasangan Zul-Rohmi disahkan KPU Provinsi NTB untuk ikut dalam kontestasi dengan nomor urut 3.

Pasangan calon dengan nomor urut 3 (Dr.H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc–Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah) ini mengambil slogan visi mewujudkan NTB yang Gemilang. NTB Gemilang adalah NTB yang punya daya saing, sekaligus pada saat yang sama menjadi rumah besar yang

---

<sup>9</sup> <https://www.wikidpr.org/>, diakses tanggal 18 Juli 2018.

<sup>10</sup> <http://www.info.pilkada ntb.info/2018/06/14>, diakses tanggal 21 Juni 2018.

nyaman, hangat, dan penuh kekeluargaan buat kita bersama.<sup>11</sup> Adapun turunan dari visi misi pasangan Zul-Rohmi terekam dalam program-program unggulan yaitu; (1) Pertumbuhan ekonomi berbasis pada kualitas yang tinggi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata antar wilayah, berpihak pada kaum miskin, pemberdayaan sumber daya lokal, produktivitas berdaya saing, dan derajat kesehatan yang tinggi, (2) Pendidikan keahlian ganda diupayakan melalui pembangunan pusat keunggulan pada pesantren dan sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian ganda (*multiskilled*) dan kompetitif pada zaman *now*, dan (3) *Morality* (peningkatan Iman dan amal sholeh) melalui pembentukan karakter (*character building*) yang berbasis pada keagamaan dan kebangsaan.

Visi misi calon nomor urut 3 pasangan Zul-rohmi tentu menjadi acuan bagi para tim sukses dalam rangka *branding* kandidat nomor urut 3 untuk mengambil hati masyarakat NTB. Dukungan dari tim sukses menguraikan dengan tegas pasangan ideal ini yaitu pandangan dari Asrorul Hadi yang merupakan tim sukses sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Umum DPC Demokrat kabupaten Lombok Tengah dengan menyatakan bahwa:

“Pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti rohmi Djalilah adalah pasangan yang ideal dan serasi bagi NTB karena merepresentasikan sosok Bapak dan Ibu bagi sebuah daerah. Pasangan ini juga menawarkan keterwakilan dari dua pulau (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa). Beruntungnya, secara demografi dan topografi politik, pasangan nomor urut 3 saja yang komposisinya memberikan posisi calon Gubernur NTB dari pulau Sumbawa yang notabene lebih kecil penduduk dan pemilihnya dibanding jumlah pemilih di pulau Lombok. Jadi sangat mudah bagi kami untuk men”*branding*” calon nomor urut 3 sebagai calon yang satu-satunya memberi ruang bagi Calon Gubernur dari pulau Sumbawa. Hal lain yaitu, pada calon dengan nomor urut 3 ini saja yang memberi ruang pada keterlibatan politik perempuan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi kami (tim sukses) untuk mencitrakan seluas-luasnya keterwakilan perempuan ini. Belum lagi, kedekatan emosional cawagub nomor urut 3 dengan Gubernur 2 priode NTB yaitu TGB Zainul Majdi yang merupakan adik kandung dari Sitti Rohmi. Salah satu pencitraan politik yang mumpuni adalah dengan men-

---

<sup>11</sup> Petikan pidato penyampaian visi misi Cagub Zulkieflimansyah pada debat terbuka pertama di Hotel Lombok raya, Sabtu 12 Mei 2018.

*branding* pasangan Zul-Rohmi yang memiliki kedekatan emosional dengan NW Pancor dan TGB”<sup>12</sup>

Argumentasi dari Asrorul Hadi menjelaskan bahwa pasangan Zul-Rohmi merupakan pasangan yang memiliki elektabilitas dan akseptabilitas yang baik dengan afiliasi organisasi keagamaan terbesar di NTB.

Hal lain yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah suksesi kontestasi pemilihan kepala daerah seperti PILGUB NTB adalah argumentasi tentang pengiklanan personal atau personal branding dari pasangan calon. Itu juga yang diinisiasi oleh pasanga calon Zul-Rohmi dengan strategi membangun citra politik seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Ziadi yang menyatakan;

“Zul-Rohmi adalah pasangan kompak, karena pasangan ini memiliki level intelektualitas yang memadai dari sisi akademik yang secara tidak langsung berperan penting dalam upaya melanjutkan ikhtiar TGB Zainul Majdi, yang mana NTB hanya membutuhkan usaha-usaha lanjutan dari keberhasilan yang sudah dicapai oleh Gubernur sebelumnya. Walaupun hanya diusung oleh dua partai yaitu partai Demokrat dan PKS, tetapi bobot personal dari pasangan nomor urut 3 ini cukup untuk mengambil hati para pemilih di NTB. Kami berkeyakinan dengan mesin partai yang terbatas, tapi militansi kedua partai ini tak diragukan lagi apalagi yang diusung adalah pasagan calon yang mendekati kesempurnaan.”<sup>13</sup>

Argumen lain juga disampaikan oleh Khairul Amsal salah satu tim sukses dan simpatisan pasangan Zul-Rohmi yang mengelaborasi tentang politik pencitraan dengan membangun sentuhan emosional (*Emotional Bounding*) pasangan calonnya dengan mengatakan;

"Zul-Rohmi adalah idealitas pemimpin NTB. Karena saya meyakini keterwakilan perempuan di ranah politik masih cukup langka. Maka hadirnya Bu Rohmi sedikit tidak akan banyak meraup suara pemilih dari kalangan perempuan. Strategi pencitraan kami sangat gampang yaitu dengan menggarap simpul-simpul pergerakan perempuan, menyentuh emosi para pemilih perempuan. Kesederhanaan bu Rohmi

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Asrorul Hadi, tim sukses pasangan Zul-Rohmi di Praya pada tanggal 27 juni 2018.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ahmad Ziadi, Tim Sukses pasangan Zul-Rohmi sekaligus Ketua DPC Demokrat Lombok Tengah di Praya tanggal 20 Juli 2018.

juga menjadi modalitas penting bagi kami untuk memasarkan pribadi cawagub nomor urut 3 ini. Pasangan Zul-Rohmi juga bermodalkan *media darling* yang kuat karena popularitas Cagub Zul yang politisi nasional dan riwayat karir politik dan keterlibatan intensif bu Rohmi di masyarakat "<sup>14</sup>

Beberapa hal yang menjadi catatan bahwa politik pencitraan yang dilakoni oleh pasangan calon nomor urut 3 (Zul-Rohmi) beserta tim yaitu berupaya dengan berbagai cara menjalankan aktivitas politik pencitraan mulai dari membangun imago afiliasi politik dengan organisasi keagamaan NW. Pencitraan lain adalah berkaitan dengan upaya *branding* pribadi Cawagub urut 3 sebagai representasi dan keterwakilan perempuan di ranah publik politik.

#### 4. Ali Bin Dahlan dan TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti

Ali Bin Dahlan lahir pada 30 Desember 1948 di Lombok Timur. Ali BD pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Timur Periode 2003-2008 dengan wakilnya Rachmat Suhardi. Kalah pada Pilkada 2008-2013 dan kembali mencalonkan diri dari jalur perseorangan dan memenangkan Pilkada Bupati Lombok Timur priode 2013-2018. Pada Kontestasi Pemilihan Gubernur NTB 2018, Ali BD menggandeng Gede Sakti Amir Murni sebagai calon wakil Gubernur dari jalur perseorangan.

Adapun Lalu Gede Sakti Amir Murni adalah politisi kelahiran Pancor Lombok Timur tanggal 01 April 1971. Pengabdian politiknya banyak dilakoni sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan DPRD Provinsi NTB serta beberapa kali mencalonkan diri sebagai wakil Bupati maupun calon Bupati Lombok Tengah. Hingga di akhir pendaftaran calon, pasangan Ali-Sakti resmi menjadi peserta PILGUB NTB 2018 dan satu-satunya calon yang lahir dari jalur perseorangan dengan mendapatkan nomor urut 4.

Ali-Sakti meyakini visi misi perubahan untuk NTB lima tahun akan datang dengan slogan "maju bersama rakyat untuk membangun NTB yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Muhammad Amrillah, tim sukses pasangan Ahyar-Mori pada tanggal 24 Juli 2018.

beradab, berkarakter dan berbudaya". Visi misi pasangan dengan nomor urut 4 diturunkan dalam bentuk program kerja unggulan yaitu; (1) Menciptakan aparatur Negara dan birokrasi yang berkompeten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, responsif, cepat dan melayani masyarakat dengan baik, (2) Pembangunan yang berkelanjutan dengan perencanaan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran (3) Membangun perekonomian berbasis potensi daerah yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat sebagai upaya untuk memajukan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan peternakan yang modern sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat.

Visi misi calon nomor urut 4 pasangan Ali-Sakti menjadi pedoman bagi para tim sukses dalam rangka mencitrakan calonnya untuk dikampanyekan kepada pemilih NTB. Pasangan calon Ali-Sakti tentu ideal dan unik bagi tim sukses. Keunikan dan Idealitas ini dicerna dan dideskripsi dengan baik oleh Basri Mulyani selaku ketua tim sukses pasangan Ali-Sakti yang menyatakan bahwa:

“Keunggulan paling utama pasangan Ali-Sakti adalah lahir dan hadirnya dari dukungan non partai tetapi dari jalur perseorangan yang secara langsung tentu merupakan suara murni dari rakyat bawah (*grassroot*). Sehingga langkah-langkah kemenangan pasangan dengan nomor urut 4 ini tentu dengan modalitas sosial yang memadai. 400 ribu KTP masyarakat NTB menjadi kekuatan awal bagi kami. Cagub Ali BD adalah seorang yang visioner dan Cawagub Gde Sakti merupakan representasi ulama dengan basis massa NW Anjani, juga Rektor UNW Mataram yang menggambarkan basis intelektualitas yang cukup mumpuni. Intinya, kami adalah satu-satunya pasangan calon yang merakyat karena benar-benar datang dari animo masyarakat NTB”<sup>15</sup>

Pendapat ketua tim sukses pasangan Ali-Sakti merupakan gambaran awal tentang begitu kuatnya modalitas pasangan nomor urut 4 ini dalam kaitannya dengan infrastruktur politik dan modalitas sosial. Pasangan yang memiliki kredibilitas dan elektabilitas yang baik dengan visi misi yang nyata

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Basri Mulyani, Ketua tim sukses pasangan Ali-Saktii di rumah pemenang Langko-Mataram pada tanggal 26 juni 2018.

dan mencitrakan juga calon wakil gubernur yang agamais dan memiliki ketokohan Tuanguru juga.

Argumentasi yang realtif sama juga disampaikan tentang kelebihan pasangan Ali-Sakti lengkap dengan strategi membangun citra politik disampaikan oleh Lalu Tajir Syahroni dengan ungkapan sebagai berikut;

“Pasangan Ali-Sakti adalah pasangan yang kompak dan menyatu, karena pasangan ini merepresentasi kekuatan rakyat karena satu-satunya dari jalur perseorangan. Kami sangat konsisten karena tawaran partai juga banyak tapi karena untuk menjaga konsistensi dan membuktikan kepada masyarakat tentang sifat istiqomah inilah yang memperkuat semangat kami untuk mengambil hati rakyat NTB pada PILGUB NTB 2018. Pasangan Ali-Sakti tentu pilihan terbaik rakyat karena Cagub Ali BD adalah sebelum mencalonkan diri merupakan Bupati Lombok Timur yang bergaya nyentrik dan aktivis, ditopang lagi dengan Cawagub Gde Sakti yang santri dan juga keterwakilan organisasi keagamaan NW Anjani yang memiliki basis suara militan. Modal kedekatan dengan rakyat inilah yang mendorong kami untuk mencitrakan pasangan Ali-Sakti dengan memampang foto-foto kedekatannya dengan masyarakat kelas bawah seperti penjual dan pedagang kaki lima dan lain-lain.”<sup>16</sup>

Junaidi (salah satu tim sukses) pasangan Ali-Sakti juga membahas tentang citra politik dan politik pencitraan pasangan calonnya dengan menyatakan bahwa;

"Usaha kami menempelkan calon nomor urut 4 (Ali-Sakti) dengan bingkai bersama rakyat adalah dengan cara-cara *nyeleneh* yang tujuannya untuk mempopulerkan kedekatan Cagub Ali BD dengan rakyat dan *grassroot*. Itu tergambar banyak dengan baliho-panflet yang menggunakan diksi-diksi *amaq ketujur*, *Amaq Asrur* <sup>17</sup> dan foto-foto Cagub Ali sedang bersama pedagang semangka dan lain-lain yang sedikit tidak akan melahirkan ketertarikan visual bagi pemilih melihat kebersahajaan calon kami. "<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Lalu Tajir Syahroni, Tim Sukses pasangan Ali-Saki di Mataram tanggal 21 Juli 2018.

<sup>17</sup> Amaq adalah panggilan bagi Bapak pada masyarakat yang di-sterotype-kan sebagai panggilan warga masyarakat kelas bawah di masyarakat Sasak-Lombok.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Junaidi, tim sukses pasangan Ali-Saktii pada tanggal 23 Juli 2018

Dari beberapa argumen dan pola politik pencitraan yang digambarkan oleh para calon dan tim sukses pasangan nomor urut 4 catatan bahwa politik pencitraan yang dibangun berupaya dengan berbagai cara menjalankan aktivitas politik pencitraan dengan lagi-lagi men-personifikasi Cagub sebagai seorang yang populis merakyat dan aktivis dan satu-satunya calon Gubernur yang bergaya *nyeleneh*. Cagub nomor urut 4 merupakan kontestan yang paling senior dari segi usia dibanding calon lain. Pencitraan dalam bentuk lain adalah berkaitan dengan melekatnya pribadi Cawagub sebagai representasi dan keterwakilan semua organisasi keagamaan NW Anjani. Oleh karena alasan satu-satunya pasangan calon dari perseorangan memberi keyakinan kepada mereka tentang kedekatannya dengan masyarakat.

Biasanya bentuk pencitraan politik yang dilakukan para politisi dengan mencoba memainkan strategi prosesi pembentukan citra dalam memperoleh dukungan opini publik. Dalam studi politik, konstruksi pencitraan politik pada prinsipnya berlangsung melalui tahapan mulai dari pencitraan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, peran serta media sosial sampai pada ranah publik-politik yaitu masyarakat NTB.

Ada pesan politik yang terbangun dengan mencoba menghegemoni masyarakat melalui program-program maupun kebijakan-kebijakan yang ditafsirkan mampu menerjemahkan kebutuhan rakyat yang terkadang dalam pelaksanaan menihilkan kepentingan umum (*masalah ammah*).

Transformasi pencitraan politik seringkali mengindikasikan kecenderungan terhadap upaya ketersediaan lahan politik perihal suksesi kepentingan partai politik, kelompok maupun individu. Fenomena ini secara nasional merujuk pada situasi dilematis terhadap keberadaan politik itu sendiri. Pada ranah argumentasi tentu memberikan kesadaran bahwa kekuatan dan kualitas representasi wilayah politik merupakan suatu keniscayaan akibat eksklusifitas politik rakyat dari institusionalisasi demokrasi yang serta merta hanya sebagai bentuk pemenuhan pretensi politik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sebut saja kesantunan politik apa yang harus diinisiasi oleh para bakal calon yang berkontestasi pada pilgub NTB 2018 nantinya. Sikap batin positif sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan cara berkomunikasi politik yang santun dan setara kepada para konstituen yang telah memilihnya untuk mendiskusikan fakta politik yang memungkinkan akan memberi jalan pada keharusan mencalonkan diri pada pilgub NTB 2018. Sikap politik dengan mendiskusikan dan meminta izin beserta mengkalkulasi kemungkinan harus intensif dilakukan bersama konstituen yang telah memilihnya dengan ketulusan. Pada faktanya, beberapa bakal calon kontestan pilgub NTB 2018 dengan sangat santai memburu kemungkinan menjadikan dirinya sebagai bakal calon gubernur padahal masa amanahnya baru berjalan kurang dari 2 tahun. Peneliti bisa pastikan tentu beberapa politisi NTB itu belum pernah melakukan komunikasi dengan konstituen di bawah. Dalam politik, komunikasi sangat memegang peran penting untuk tercapainya tujuan-tujuan politik yang mengandaikan keadilan, kemakmuran dan kemaslahatan sebuah pemerintahan termasuk ditingkat provinsi seperti NTB. Karena setiap bentuk komunikasi akan melahirkan dan menghasilkan makna yang tidak hanya pencitraan politik akan tetapi nilai amanat yang harus menjadi ruh dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Problem dasarnya adalah di setiap perhelatan pilkada termasuk di NTB, perilaku para pelaku politik maupun pihak-pihak yang berkait dalam pelaksanaan pilkada yang menengarai dan menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai penyimpangan. Agenda pilkada menjadi ajang untuk mengejar posisi kepala daerah sebagai sebuah profesi yang menguntungkan bukan lagi sebagai tanggung jawab, sehingga orientasinya lebih banyak mengarah kepada keinginan menghalalkan segala cara guna mendapatkan jabatan tersebut. Perilaku politik melupakan janji kampanye menyelesaikan masa jabatan dinafikan bila kontestasi yang lebih besar digelar seperti pada pilgub NTB 2018. Para bupati/walikota dengan semangat yang luar biasa mencari jalan untuk bisa ikut berkontestasi pada gelaran pilkada gubernur NTB di 2018.

Catatan di atas mensinyalir dengan baik bahwa secara keseluruhan para bakal calon Gubernur pada pilgub NTB 2018 tidak banyak yang menegaskan argumentasi pencalonannya dengan uji klinis terhadap visi dan misinya dalam mencalonkan diri. Program-program yang menyoar peningkatan kesejahteraan rakyat NTB kadang tak terdengar apalagi dengan *test-stone* (batu uji) TGB yang menyodorkan keberhasilan-keberhasilan fenomenal dalam pembangunan NTB. Maka, seyogyanya kemampuan-kemampuan manajerial dan *leadership* itu yang harus dielaborasi sebanyak-banyaknya. Bukan sebaliknya, hanya banyak mempertontonkan syahwat politik dan berkuasa dengan kadang-kadang menurunkan integritas pribadi para politisi NTB itu sendiri.

Tanpa kita sadari, nilai etis politik cenderung mengarah pada kompetisi dan kontestasi yang mengabaikan demokrasi substantif. Ini terbukti dengan mengguritanya *political shopping* (pasar politik) karena semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang dan semua jabatan politik memiliki banderol (daftar harga) yang harus dibayar. Belum lagi, preferensi kepada pilihan politik yang kadang-kadang menyesakkan nurani dengan fakta-fakta para politisi dengan sangat santai meninggalkan kewajiban menjalankan amanat sampai periode berakhir tetapi sudah memburu posisi yang lebih tinggi dan strategis tanpa ada sedikitpun upaya untuk berkonsultasi dengan konstituen yang sekaligus tempat menyerahkan dan melaporkan pertanggungjawaban sebagai ekspresi kedaulatan rakyat. Fenomena politik yang menyeruak belakangan pada kontestasi setiap pilkada ini malah mengarah serta menohok pada arus balik yang condong mengotori demokrasi substantif. Apa yang terlihat adalah hadirnya nilai-nilai *psedu-democracy* (kepura-puraan demokrasi).

Sedikit tidak ada beberapa contoh kasus yang mencederai etika politik dan etika politik Islam pada perhelatan pilkada dimana pun tidak hanya di NTB. Persoalan etika dan perilaku politik para politisi dan pemimpin baik dari tingkat pusat sampai daerah (provinsi, kabupaten dan kota) mempertontonkan politik pencitraan dalam rangka mengejar posisi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Misalkan saja dalam Pilkada (Pemilihan Kepala

Daerah) seperti pemilihan Gubernur termasuk di Nusa Tenggara barat (NTB), dalam pilkada sebelumnya si A terpilih menjadi wakil rakyat, Bupati atau Walikota yang itu berarti si A harus mengemban amanat dan bertanggung jawab kepada konstituen selama 5 tahun kedepan. Namun, karena ada momentum pemilihan Gubernur 2018 serta merta hasrat kuasa itu membunyah untuk siap-siap mencalonkan diri menjadi calon Gubernur dengan tanpa rasa dosa penghianatan terhadap janji ketika kampanye di tingkat kabupaten dan kota dengan amanat menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan masa bakti dilantik.

Dalam level sederhana politik pencitraan dalam pentas pemilihan Gubernur NTB 2018 didalamnya ada *political marketing* karena para kandidat dipasarkan seperti menjual sebuah produk.

Temuan utama dari studi tentang politik pencitraan pada pilgub NTB 2018 paling tidak ditemukan 5 kecenderungan;

- 1) Antusiasme Syahwat Politik ke Level Lebih Tinggi

Kecenderungan pertama ini terjadi begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang jelas apalagi dikomunikasikan lebih dahulu kepada konstituen pemilihnya. Modalitas partai bisa jadi menjadi pertimbangan paling utama yang menyebabkan calon A dan B sangat antusias untuk melaksanakan niat pribadinya untuk mencalonkan diri pada kontestasi pilgub NTB 2018. Perimbangan lain tentu datang dari konstalasi besar partai-partai untuk memperkuat dan mengembangkan sayap politik yang menggurita sampai di daerah termasuk NTB.

Argumentasi resmi dari partai mencalonkan A dan B adalah terbukti berhasil menjadi bupati/walikota dua periode, selama menjadi bupati/walikota calon A dan B memiliki *track record* yang baik dengan membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat, di samping itu calon A dan B disimpulkan memiliki elektabilitas yang tinggi berdasarkan hasil survei internal. Klaim berlebih juga didapatkan oleh calon A dan B sebagai pemimpin yang dicintai dan dikehendaki rakyat karena dekat dan selalu bersama rakyat. Terakhir kedua tokoh dikenal

sebagai tokoh agama dan pemimpin yang mempunyai basis keagamaan yang kuat serta di dukung oleh partai yang lain.

Pencitraan politik di atas dilakukan semata-mata karena adanya syahwat politik dalam mencitrakan satu pasangan calon dengan tanpa berusaha mengkonsultasikannya dengan para konstituen yang memilihnya atau masyarakat yang dipimpin pada saat dia mencalonkan diri.

## 2) Perempuan dan Kecenderungan Politik Dinasti

Sebut saja C salah satu bakal calon Gubernur NTB yang notabene tanpa harus ditutup-tutupi berkecenderungan politik dinasti. Munculnya calon C patut diperhitungkan secara politik karena beberapa sebab. Antara lain pertama, karena –sampai penelitian ini dilakukan- calon C menjadi satu-satunya nama yang muncul di kalangan perempuan terkait kontestasi Pilkada NTB 2018. Kedua, calon C merupakan kakak kandung petahana yang telah memberikan “cita rasa sedap” pada proses pembangunan sosial kemasyarakatan NTB dalam sepuluh tahun terakhir.

Secara praksis, fenomena di atas yaitu mayoritas pemimpin perempuan itu lahir dari rahim dinasti politik dalam artian selalu mewarisi sumber-sumber simbolik kepemimpinan anggota keluarganya. Pilihan kecenderungan politik dinasti berkah patut disematkan kepada calon C dengan fakta melekatnya sumber simbolik kepemimpinan baik dari kakek, orang tua maupun saudaranya. Di samping kepemilikan *track record* yang baik dalam dunia politik dan intelektualitas yang memadai juga dimiliki oleh calon C.

Analisis politik pencitraannya adalah kalau menyimpulkan pada simpul demokrasi dan politik yang berkeadaban dan setara, maka calon perempuan dengan dinasti politik tentu memiliki ruang yang sama dalam kontestasi pilkada Gubernur NTB 2018. Tapi problem dramatisnya adalah keharusan calon C untuk menguji elektabilitas dan keberterimaan politik masyarakat NTB yang harus dilakukan

secara *fair* tanpa melibatkan politik dinasti dan tekanan institusional organisasi yang memengaruhi masyarakat. Ini penting guna menghindarkan asumsi yang semata-mata telah terjadi fenomena politik dinasti.

### 3) Politisi Nasional Turun Gunung

Realitas politik Pilkada selalu menyuguhkan polarisasi yang kompleks dikarenakan legitimasi dan jawaban argumentatif yang melatarinya. Sebut saja beberapa bakal calon yang berniat pada pilkada Gubernur NTB 2018 dengan sangat semangat turun gunung dari pentas politik nasional untuk mengadu nasib pada Pilgub 2018 nantinya. Pertimbangan mengabdikan pada daerah paling sering muncul menjadi alasan klasik untuk melegitimasi pilihan politik. Beberapa bakal calon tersebut kalau disebutkan telah memiliki posisi dan jabatan politik yang mentereng di kancah perpolitikan nasional, akan tetapi daya tarik Pilkada selalu menjadi rangsangan kuat untuk dilakoni.

### 4) Personifikasi Personal Kandidat

Momentum Pilgub NTB 2018 memperlihatkan adanya fenomena pencitraan calon Gubernur dan Wakil Gubernur baik dengan foto-foto di baliho dalam citra tokoh agama (Tuan Guru: Sasak) lengkap dengan surban dan peci putih, tokoh adat dengan menyematkan simbol-simbol tradisi Sasak serta simbol-simbol warna yang melambangkan warna organisasi sosial dan keagamaan tertentu.

Penonjolan citra yang berbasis dan berintegritas agamais (Muslim), tidak jarang menjadi salah satu strategi komunikasi politik pencitraan. Kesalehan dalam bungkus ritus keagamaan dan semiotika melalui pakaian dan atribut menjadi petanda masif politik pencitraan pada masing-masing kandidat. Fakta ini menjadi wajar karena simbol agama masih dianggap determinan dan serius untuk dijalankan pada pembangunan citra. Agama juga menjadi senjata yang ampuh dalam

usaha menarik dan mengail dukungan dan simpati pemilih pada momen kandidasi pemilihan Gubernur di NTB.

Secara teoritis, tidak ada yang salah dalam pilihan membangun citra politik melalui simbol-simbol religiusitas. Karena dalam hal *candidate-oriented campaigns* bukan hal yang aneh bila dalam kampanye mendadak adanya kecenderungan penguatan simbol-simbol keagamaan para kandidat melalui ritus agama dan penampilan fisik yang seharusnya menjadi kesalehan personal.

#### 5) Psedo-Populis

Model politik pencitraan lain yaitu adanya fenomena mendadak populis yang ditampilkan oleh beberapa calon dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara menampilkan foto-foto kedekatan sang calon dengan masyarakat bawah seperti pedagang kecil, para tunawisma dan lain-lain yang terpampang di ruang-ruang publik dengan aksentuasi begitu dekatnya para calon dengan *grass-root*.

Fakta juga menggambarkan upaya politik pencitraan dengan penggunaan nama-nama populis seperti *amaq*<sup>19</sup> untuk menggambarkan *pseudo-populis* sang calon dengan berusaha merepresentasikan diri dengan golongan tertentu guna menarik simpati elektoral.

#### 6) Penguatan Identitas Komunal dan Kewilayahan

Identitas komunal seperti afiliasi pada organisasi keagamaan, putra daerah yang berbasis kewilayahan dan asal suku juga menjadi mainan empuk para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka mengail elektabilitas pada Pilgub NTB 2018.

---

<sup>19</sup> Diksi *amaq* dalam masyarakat Sasak berarti Bapak yang dalam tradisi stratifikasi sosial masyarakat Sasak termasuk sebutan untuk kelas sosial jajar karang yang berada di bawah stratifikasi bangsawan.

## **B.2 Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Politik Pencitraan pada PILGUB 2018**

Citra dalam politik pada galibnya lebih dari sekedar strategi untuk menampilkan kandidat kepada para pemilih. Tetapi juga berkaitan dengan kesan yang dimiliki oleh pemilih baik yang diyakini sebagai hal yang benar atau tidak. Artinya, citra lebih dari sekedar pesan yang dibuat oleh kandidat maupun gambaran yang dibuat oleh pemilih, tetapi citra merupakan negosiasi, evaluasi dan konstruksi oleh kandidat dan pemilih dalam sebuah usaha bersama. Dengan kata lain, keyakinan pemilih tentang kandidat berdasarkan interaksi atau kesalingbergantungan (*mutual acceptance*) antara yang dilakukan oleh kandidat dan persepsi pemilih juga. Dengan demikian, citra adalah transaksi antara strategi seorang calon dalam menciptakan kesan personal dengan kepercayaan yang sudah ada dalam benak para pemilih.

Citra yang baik dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat, begitupun sebaliknya. Sehingga tidak salah kiranya bila calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut pada kontestasi pemilihan Gubernur di NTB rata-rata melakukan politik pencitraan. Karena semakin dapat menampilkan citra yang baik, maka peluang untuk meraup dukungan pemilih semakin besar.

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa etika politik merupakan dimensi moral filosofis dari ilmu politik praksis termasuk fenomena politik pilkada Gubernur NTB 2018 yang secara inheren harus dilatari oleh kemampuan menyadari signifikansi etika politik dalam ranah politik pencitraan yang resiprokal antara bakal calon dan modalitas konstituen pada suksesi Pilkada. Tanpa mendiskusikan dan melibatkannya akan membuat ilmu politik teoritis maupun praksis akan timpang. Sebut saja ketimpangan itu adalah pemiskinan politik.

Pada ujung bab ini, fenomena politik pencitraan politisi NTB pada Pilkada Gubernur NTB 2018 diuji analisis dengan etika politik Islam. Etika politik Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya

dengan etika lain. Etika politik Islam sekurang-kurangnya mempunyai lima ciri utama yang dicobakan untuk operasinalisasinya dalam menilik fenomena laku dramatis politisi NTB:

*Pertama*, dimensi Rabbani (berketuhanan) dalam tujuan, sarana dan aksi politik. Pada momentum menjelang Pilgub NTB 2018, politik pencitraan para pasangan calon Gubernur dalam Pilgub NTB belum mampu menghadirkan dimensi robbani dalam penentuan pilihan politik dikarenakan semata-mata yang tergambar adalah politik dalam makna kepentingan. Itu belum sampai pada tujuan suci politik yang berpihak pada rakyat, belum dengan infrastruktur politik yang berketuhanan karena sangat elitis dan belum juga memilih aksi politik yang bernilai ibadah dalam rangka *sidqah* (amal) pengabdian yang memberi ruang manfaat dan maslahat sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia lain dan umat. Karena ciri rabbani (berketuhan) menegaskan bahwa etika politik Islam membimbing manusia ke arah yang benar atau jalan yang lurus.

*Kedua*, laku politik manusiawi. Fakta politik pencitraan para kontestan pilgub NTB 2018 yang lebih mementingkan *euphoria* pesta demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substantif tersaji pada jelang pilkada Gubernur NTB 2018. Bagaimana tidak, politisi NTB dengan sangat santai melupakan janji politik yang bila memenangkan pertarungan pada pilkada tertentu untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 5 tahun, tapi karena tergiur sahwat politik melupakan janji itu. Malah di beberapa tahun berjalan kepemimpinannya banyak menghabiskan waktu untuk bermanuver politik dan mencari jalan agar diusung menjadi bakal calon pada pilkada Gubernur NTB 2018. Fenomena ini menggambarkan begitu kurang memenuhi syarat etisnya politik praktis yang dilakoni oleh beberapa politisi. Wajar kiranya stigmatisasi minor “pemimpin tidak amanat”, “pemimpin kutu loncat” sering terdengar dan keluar dari mulut konstituen dan masyarakat. Karena ciri manusiawi berarti etika politik Islam memperhatikan dan memenuhi fitrah manusia serta menuntunnya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

*Ketiga*, etika politik Islam berdimesi universal. Dalam kontestasi menjelang Pilkada Gubernur NTB 2018 terlihat jelas keberpihakan politisi tidak banyak menyentuh dimensi terdalam relasi antara calon pemimpin dengan konstituen yang berdaulat. Para calon Gubernur dan calon Waki Gubernur lebih banyak mengorientasi visi politiknya hanya pada tujuan mendapatkan kekuasaan tanpa menyadari bahwa kebahagiaan hakiki politisi adalah kemampuan menebar *maslahat* dan berbagi atas nama cinta sesama. Karena ciri dimensi etika politik Islam universal ialah etika politik Islam membawa misi kasih sayang kepada ummat manusia di seluruh dunia, menegakkan kedamaian, menciptakan keamanan dan ketenangan baik secara individual maupun komunal.

*Keempat*, karakteristik etika politik Islam yang berkeimbangan. Ciri keseimbangan artinya mengajarkan bahwa manusia memprioritaskan kepentingan ukhrawi tanpa melupakan kepentingan duniawi begitu juga memenuhi keperluan rohani tanpa mengabaikan keperluan jasmani. Niat tulus politik harus mencul dari keseluruhan politisi NTB yang ingin bertarung pada Pilgub NTB 2018. Karena segala tujuan, sarana dan aksi politik seyogyanya berorientasi pada bagaimana membangun keseimbangan antara kepentingan politis dengan nilai etis dari politis yang melahirkan kepuasan dan kebahagiaan yang pada ujungnya menjadi seni mengabadikan diri untuk selalu diingat dan didoakan bila waktu berakhir.

*Kelima*, karakteristik realistik dalam etika politik Islam. Ciri realistik dalam *patson* etika politik Islam adalah memperhatikan kenyataan hidup manusia. Pilkada Gubernur NTB 2018 yang akan digelar memerlukan kontestan yaitu para politisi NTB yang berpihak pada realitas sosial, ekonomi, budaya dan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan konstituen. Bagaimana tidak, bila kesadaran melek kenyataan hidup tidak dimiliki oleh masing-masing bakal calon Gubernur NTB maka yang terjadi adalah kepura-puraan politik dan demokrasi yang bisa jadi sebatas aksi politik teoritis dan bersemayam di menara gading tanpa ada kemampuan para politisi untuk menurunkannya menjadi fenomena politik yang memang membutuhkan aksi-

aksi nyata dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, memakmurkan rakyat NTB dan selalu ada di hati rakyat yang berdaulat secara politik.

## BAB V

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi, analisis dan penelaah secara kritis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa;

- a. Politik pencitraan yang dimainkan oleh Politisi NTB menjelang Pilkada memiliki beberapa kecenderungan yaitu; *pertama*, Antusiasme Syahwat Politik dimana A dan B mencalonkan diri menjadi Gubernur NTB 2018 padahal masa baktinya baru berjalan kurang dari 2 Tahun. *Kedua*, Fenomena perempuan dan kecenderungan politik dinasti. *Ketiga*, kecenderungan politisi nasional turun gunung. *Keempat*, Personafikasi Personal Kandidat seperti penonjolan citra yang berbasis dan berintegritas agamais (Muslim), tidak jarang menjadi salah satu strategi komunikasi politik pencitraan. Kesalehan dalam bungkus ritus keagamaan dan semiotika melalui pakaian dan atribut menjadi petanda masif politik pencitraan pada masing-masing kandidat. *Kelima*, Psedo-Populis yaitu adanya fenomena mendadak populis yang ditampilkan oleh beberapa calon dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara menampilkan foto-foto kedekatan sang calon dengan masyarakat bawah seperti pedagang kecil, para tunawisma dan lain-lain. *Terakhir* adalah Penguatan Identitas Komunal dan Kewilayahan seperti afiliasi pada organisasi keagamaan, putra daerah yang berbasis kewilayahan dan asal suku juga menjadi mainan empuk para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka mengail elektabilitas pada Pilgub NTB 2018.
- b. Bahwa etika politik memiliki tiga dimensi yaitu tujuan, sarana dan aksi politik itu sendiri. Pada dimensi tujuan bila diurai dan dikontekstualisasi dengan fenomena pilkada, maka tujuan suksesi adalah upaya sadar laku politik dalam upaya peremajaan dan pergantian kepemimpinan yang tujuannya tidak lain adalah peningkatan akseleratif pada tujuan-tujuan politik pilkada dalam

rangka memacu dengan lebih cepat upaya penyejahteraan masyarakat dengan monitoring kuat dari etika politik yang santun, beradab dan berkeadilan. Sedangkan pada dimensi sarana, opsi perhelatan pilkada langsung merupakan instrumen terbaik dalam rangka mendapatkan kualitas kontestasi politik yang terbuka dan memberi partisipasi penuh kepada warga masyarakat. Pada dimensi aksi politik berkaitan erat dengan perilaku politisi yang harus menjadikan etika politik yang santun, berkeadaban dan berkeadilan menjadi *guiding* di setiap perilaku politik yang selalu memenangkan hati konstituen dan rakyat sebagai wujud memberikan hak kedaulatan pada rakyat.

- c. Pada perspektif etika politik Islam, maka politik pencitraan para calon dan pasangan calon pada Pilgub NTB 2018 tidak bisa dikehendaki terjadi karena; *Pertama*, keharusan Pilkada berdimensi *Rabbani* (berketuhanan) dalam tujuan, sarana dan aksi politik. *Kedua*, kewajiban laku politik para politisi yang harus manusiawi. *Ketiga*, Politisi yang beretika politik Islam harus berdimensi universal. *Keempat*, karakteristik etika politik Islam yang berkeseimbangan. *Kelima*, karakteristik realistis dalam etika politik Islam yang harus mendasari visi dan misi para kandidat.

## Daftar Pustaka

- Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah wal Wilayatu al-Diniyyah*, Mesir : Musthafa al-Asabil Halabi, 1973.
- Ahmad Fathi Bahatsi, *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Dar al-Arubah, Tampa Tahun.
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Ahmad Nursal, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Anas urbaningrum, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Andy Sulistiyanto, *Mujahid Dakwah yang tak Kenal Lelah*, dalam Edisi Khusus 100 Tahun Muhammad Natsir, Majalah Islam Sabili.
- Anwar Arifin, *Opini Publik*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2008
- Bob Franklin, *Packaging Politics*, First Publisher, London: Great Britain, 1994
- Brian McNair, *An Introduction of Political Communication*, London: Routledge, 1995

Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.

Dennis Kavanagh, *Ellection Campaigning: The New Marketing Of Politics*, UK: Blackwell, 1997

Denny JA, *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2006

Firmanza, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara Dan Syari'ah*, Jakarta: KPG, 2012.

Hannah Arendt, *The Human Condition*, Chicago: The Chicago UP, 1958.

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014.

Ichsanul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

\_\_\_\_\_ , *Partisipasi Partai Politik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Muhammad Hawari, *As-Siyasah al-Hizbiyyah li al-harakah al-Islamiyyah: Syarh 'ala Kitab at-Takattul al-Hizbi*, Palestina: T.p, 2003.

Muhammad Zakaria al-Naddaf, *Akhlaqus Siyasi Li al-Daulah al-Islamiyyah Fi al Qur'an wa al-Sunnah*, Damaskus: Dar al-Qolam, 2006

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.,1991.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

Robert E. Denton Jr. (Ed.), *Political Communication Ethics: An Oxymoron?*, Praeger Publisher, 2000

Rochajat Harun dan Sumarno, *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Mandarmaju, 2006

Stanley J. Baran & Denni K. Davis, *Mass Communication Theory, Foundation, Ferment, and Future*, Wadsworth, 2000.

Sigmund Neuman, "Modern Political Parties", *Comparative Politics: A Reader*, Harry E. Eckstein (Ed.), .London : The Free Press of Glencoe, 1963.

Steven H. Chafee, *Political Communication*, Vol.VII, Sage Publication, 1975.

Yasraf Amir Piliang, *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*, Solo: Tiga Serangkai, 2003

Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

JURNAL/MAKALAH

David Michel Ryfe, *History and Political Communication; An Introduction*,  
Political Communication Journal, 2001

M.Alwi Dahlan, *Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian*,  
Jurnal Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 1989

Effendi Gazali, *Hand Book Matakuliah Persuasi dan Manajemen Pencitraan*,  
MKompol, Universitas Indonesia, 2007

Steven Chaffee, *Studying the New Communication of Politics*, Political  
Communication Journal, 2001

#### TESIS/DISERTASI

Budi Utami, *Politik Pencitraan Calon Presiden, Studi Pemanfaatan Media  
Massa untuk Membentuk Citra Politik Megawati Soekarno Putrid an  
Wiranto*, Tesis Ilmu Komunikasi, Jakarta: FISIP UI, 2008

Effendi Gazali, *Communication of Politics amd Politics of Communication in  
Indonesia: A Study of Media Performance, Responsibility and  
Accountability*, Doctoral Thesis, Nijmegen: Radbound University  
Nijmegen, 2004

#### ARTIKEL/OPINI/BERITA SURAT KABAR

Algooth Putranto, *Ramadhan dan Citra Politik dalam Pertarungan Pilkada  
Serentak 2018*, Kompas.com, 18 Mei 2018

Galang Asmara, *Akibat Money Politic dan Kampanye Hitam dalam Pemilihan  
Kepala Daerah*, Harian Nusa, Tanggal 22 Januari 2018

Yasraf Amir Piliang, *Banalitas Citra Politik*, Artikel di Harian Kompas,  
Tanggal 25 Juni 2004